



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS SOSIAL**

**RENCANA KERJA**  
**(RENJA) PERUBAHAN**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan untuk penyempurnaan dalam perencanaan ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Ranai, 14 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP., M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....</b>	<b>7</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	15
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH.....</b>	<b>18</b>
	3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	18
	3.2 Cascading dan Crosscutting.....	18
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>19</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);
17. Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 70);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 269).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Renja Perubahan Dinas Sosial disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2023;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

- Bab I    Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II   Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan
- Bab III   Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023
- Bab IV   Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023**

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah melaksanakan 6 (enam) Program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Program utama tersebut akan dianalisis realisasi anggaran sampai dengan triwulan II per 30 Juni 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2023

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
<b>02. BL</b>		<b>4,451,446,870.00</b>	<b>2,195,757,178.00</b>	<b>2,255,689,692.00</b>	<b>49.33</b>
<b>01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39,327,464.00</b>	<b>5,701,105.00</b>	<b>33,626,359.00</b>	<b>14.50%</b>
<b>01.2.01.06.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>39,327,464.00</b>	<b>5,701,105.00</b>	<b>33,626,359.00</b>	<b>14.50%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,600,000.00	2,809,105.00	790,895.00	78.03%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,259,084.00	442,000.00	817,084.00	35.10%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	930,000.00	650,000.00	280,000.00	69.89%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000.00	300,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,620,000.00	1,500,000.00	120,000.00	92.59%
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,018,380.00	0.00	24,018,380.00	0.00%
<b>01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,225,796,609.00</b>	<b>1,510,699,242.00</b>	<b>715,097,367.00</b>	<b>67.87%</b>
<b>01.2.02.01.</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2,225,796,609.00</b>	<b>1,510,699,242.00</b>	<b>715,097,367.00</b>	<b>67.87%</b>
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	929,952,870.00	559,951,800.00	370,001,070.00	60.21%
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	61,215,000.00	40,024,068.00	21,190,932.00	65.38%
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85,323,000.00	50,600,000.00	34,723,000.00	59.30%
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	39,413,000.00	25,120,000.00	14,293,000.00	63.74%
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19,390,000.00	10,280,000.00	9,110,000.00	53.02%
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	43,508,000.00	27,229,920.00	16,278,080.00	62.59%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	3,089,463.00	640,200.00	2,449,263.00	20.72%
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,000.00	7,595.00	4,405.00	63.29%
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79,710,907.00	44,790,129.00	34,920,778.00	56.19%
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,943,000.00	1,007,254.00	935,746.00	51.84%
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5,828,000.00	3,021,786.00	2,806,214.00	51.85%
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4,673,130.00	0.00	4,673,130.00	0.00%
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	370,890,000.00	295,865,998.00	75,024,002.00	79.77%
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	563,655,000.00	443,810,992.00	119,844,008.00	78.74%
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17,193,239.00	8,349,500.00	8,843,739.00	48.56%
<b>01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>58,748,380.00</b>	<b>2,447,850.00</b>	<b>56,300,530.00</b>	<b>4.17%</b>
<b>01.2.05.02.</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>24,730,000.00</b>	<b>2,447,850.00</b>	<b>22,282,150.00</b>	<b>9.90%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5,200,000.00	2,447,850.00	2,752,150.00	47.07%
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,530,000.00	0.00	19,530,000.00	0.00%
<b>01.2.05.11.</b>	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>34,018,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,018,380.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,018,380.00	0.00	24,018,380.00	0.00%
<b>01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>382,794,140.00</b>	<b>121,671,572.00</b>	<b>261,122,568.00</b>	<b>31.79%</b>
<b>01.2.06.02.</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>78,000,000.00</b>	<b>43,794,000.00</b>	<b>34,206,000.00</b>	<b>56.15%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23,000,000.00	11,211,000.00	11,789,000.00	48.74%
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7,000,000.00	4,200,000.00	2,800,000.00	60.00%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12,000,000.00	7,740,000.00	4,260,000.00	64.50%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19,800,000.00	11,795,000.00	8,005,000.00	59.57%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10,700,000.00	6,340,000.00	4,360,000.00	59.25%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5,500,000.00	2,508,000.00	2,992,000.00	45.60%
<b>01.2.06.03.</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00%
<b>01.2.06.04.</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>4,260,000.00</b>	<b>7,740,000.00</b>	<b>35.50%</b>
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12,000,000.00	4,260,000.00	7,740,000.00	35.50%
<b>01.2.06.05.</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>23,175,000.00</b>	<b>13,291,700.00</b>	<b>9,883,300.00</b>	<b>57.35%</b>
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13,175,000.00	5,885,000.00	7,290,000.00	44.67%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	10,000,000.00	7,406,700.00	2,593,300.00	74.07%
<b>01.2.06.06.</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>50.00%</b>
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
<b>01.2.06.07.</b>	<b>Penyediaan Bahan/Material</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,985,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>99.25%</b>

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2,000,000.00	1,985,000.00	15,000.00	99.25%
<b>01.2.06.09.</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>237,949,140.00</b>	<b>52,340,872.00</b>	<b>185,608,268.00</b>	<b>22.00%</b>
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,800,000.00	7,220,000.00	3,580,000.00	66.85%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja	219,274,140.00	44,670,872.00	174,603,268.00	20.37%
5.1.02.04.01.0003.	Perjalanan Dinas Dalam Kota <b>Penatausahaan</b>	7,875,000.00	450,000.00	7,425,000.00	5.71%
<b>01.2.06.10.</b>	<b>Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0045.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	6,670,000.00	0.00	6,670,000.00	0.00%
<b>01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>211,000,535.00</b>	<b>8,923,750.00</b>	<b>202,076,785.00</b>	<b>4.23%</b>
<b>01.2.07.02.</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>8,923,750.00</b>	<b>35,076,250.00</b>	<b>20.28%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14,000,000.00	8,923,750.00	5,076,250.00	63.74%
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
<b>01.2.07.05.</b>	<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00%
<b>01.2.07.06.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>117,000,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000,535.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%
5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00%
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15,000,535.00	0.00	15,000,535.00	0.00%
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00%
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00	0.00%
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00%
<b>01.2.07.07.</b>	<b>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
<b>01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228,000,000.00</b>	<b>121,964,008.00</b>	<b>106,035,992.00</b>	<b>53.49%</b>
<b>01.2.08.01.</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>26,500,000.00</b>	<b>13,644,000.00</b>	<b>12,856,000.00</b>	<b>51.49%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15,500,000.00	7,684,000.00	7,816,000.00	49.57%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	55.56%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,000,000.00	960,000.00	1,040,000.00	48.00%
<b>01.2.08.02.</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>500,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>429,000.00</b>	<b>14.20%</b>
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	500,000.00	71,000.00	429,000.00	14.20%
<b>01.2.08.04.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>201,000,000.00</b>	<b>108,249,008.00</b>	<b>92,750,992.00</b>	<b>53.86%</b>
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	142,000,000.00	89,200,000.00	52,800,000.00	62.82%
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	38,000,000.00	6,500,000.00	31,500,000.00	17.11%
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10,000,000.00	5,500,000.00	4,500,000.00	55.00%
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10,200,000.00	6,408,192.00	3,791,808.00	62.83%
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	450,000.00	320,400.00	129,600.00	71.20%
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	350,000.00	320,416.00	29,584.00	91.55%
<b>01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>97,700,000.00</b>	<b>77,802,315.00</b>	<b>19,897,685.00</b>	<b>79.63%</b>
<b>01.2.09.02.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>40,700,000.00</b>	<b>23,518,515.00</b>	<b>17,181,485.00</b>	<b>57.79%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8,500,000.00	4,328,265.00	4,171,735.00	50.92%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20,000,000.00	9,785,250.00	10,214,750.00	48.93%
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6,000,000.00	5,950,000.00	50,000.00	99.17%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,000,000.00	1,955,000.00	1,045,000.00	65.17%
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	75.00%
<b>01.2.09.06.</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>68.57%</b>
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2,500,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00	52.00%
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	77.78%
<b>01.2.09.11.</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>49,483,800.00</b>	<b>516,200.00</b>	<b>98.97%</b>
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50,000,000.00	49,483,800.00	516,200.00	98.97%
<b>02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>135,591,000.00</b>	<b>60,874,692.00</b>	<b>74,716,308.00</b>	<b>44.90%</b>
<b>02.2.03.02.</b>	<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>98,435,000.00</b>	<b>59,239,192.00</b>	<b>39,195,808.00</b>	<b>60.18%</b>

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16,200,000.00	5,649,630.00	10,550,370.00	34.87%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	975,000.00	907,000.00	68,000.00	93.03%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600,000.00	580,000.00	20,000.00	96.67%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,150,000.00	800,000.00	350,000.00	69.57%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00%
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,700,000.00	1,425,000.00	1,275,000.00	52.78%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,000,000.00	9,750,000.00	2,250,000.00	81.25%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,500,000.00	498,750.00	1,001,250.00	33.25%
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,970,000.00	5,700,000.00	270,000.00	95.48%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,040,000.00	21,483,812.00	21,556,188.00	49.92%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000.00	220,000.00	155,000.00	58.67%
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,275,000.00	4,275,000.00	0.00	00.00%
<b>02.2.03.05.</b>	<b>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</b>	<b>37,156,000.00</b>	<b>1,635,500.00</b>	<b>35,520,500.00</b>	<b>4.40%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	512,000.00	482,000.00	30,000.00	94.14%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	195,000.00	116,000.00	79,000.00	59.49%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000.00	300,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,242,000.00	300,000.00	942,000.00	24.15%
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,000,000.00	437,500.00	562,500.00	43.75%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,382,000.00	0.00	12,382,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,875,000.00	0.00	4,875,000.00	0.00%
<b>04.2.01.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>550,263,191.00</b>	<b>113,294,108.00</b>	<b>436,969,083.00</b>	<b>20.59%</b>
<b>04.2.01.03.</b>	<b>Penyediaan Alat Bantu</b>	<b>230,800,931.00</b>	<b>40,065,316.00</b>	<b>190,735,615.00</b>	<b>17.36%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50,000,000.00	16,012,500.00	33,987,500.00	32.03%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,544,451.00	982,400.00	562,051.00	63.61%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,000,000.00	564,000.00	436,000.00	56.40%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	37.50%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,300,000.00	420,000.00	880,000.00	32.31%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,206,480.00	21,486,416.00	61,720,064.00	25.82%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00%
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	91,200,000.00	0.00	91,200,000.00	0.00%
<b>04.2.01.11.</b>	<b>Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</b>	<b>60,712,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,712,360.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,712,360.00	0.00	60,712,360.00	0.00%
<b>04.2.01.12.</b>	<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>	<b>258,749,900.00</b>	<b>73,228,792.00</b>	<b>185,521,108.00</b>	<b>28.30%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,900,000.00	989,250.00	1,910,750.00	34.11%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600,000.00	294,100.00	305,900.00	49.02%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	40.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2,368,650.00	700,000.00	1,668,650.00	29.55%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	230,651,250.00	70,445,442.00	160,205,808.00	30.54%
<b>05.2.02.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>241,019,277.00</b>	<b>96,284,670.00</b>	<b>144,734,607.00</b>	<b>39.95%</b>
<b>05.2.02.03.</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>192,019,277.00</b>	<b>96,284,670.00</b>	<b>95,734,607.00</b>	<b>50.14%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20,900,000.00	11,056,470.00	9,843,530.00	52.90%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,104,277.00	585,900.00	518,377.00	53.06%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600,000.00	595,000.00	5,000.00	99.17%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	98,400,000.00	51,300,000.00	47,100,000.00	52.13%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,849,000.00	1,312,000.00	537,000.00	70.96%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2,672,000.00	500,000.00	2,172,000.00	18.71%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58,494,000.00	26,235,300.00	32,258,700.00	44.85%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000.00	4,200,000.00	3,300,000.00	56.00%
<b>05.2.02.04.</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00%
<b>06.2.01.</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>97,601,064.00</b>	<b>38,027,836.00</b>	<b>59,573,228.00</b>	<b>38.96%</b>

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
<b>06.2.01.01.</b>	<b>Penyediaan Makanan</b>	<b>97,601,064.00</b>	<b>38,027,836.00</b>	<b>59,573,228.00</b>	<b>38.96%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8,872,824.00	5,228,644.00	3,644,180.00	58.93%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16,751,000.00	16,751,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,050,000.00	1,426,160.00	623,840.00	69.57%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600,000.00	238,000.00	362,000.00	39.67%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	66.67%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,919,000.00	634,032.00	1,284,968.00	33.04%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,583,240.00	12,750,000.00	30,833,240.00	29.25%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00%
<b>06.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>164,605,210.00</b>	<b>35,136,689.00</b>	<b>129,468,521.00</b>	<b>21.35%</b>
<b>06.2.02.02.</b>	<b>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</b>	<b>164,605,210.00</b>	<b>35,136,689.00</b>	<b>129,468,521.00</b>	<b>21.35%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14,964,110.00	7,482,055.00	7,482,055.00	50.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,400,000.00	1,318,500.00	1,081,500.00	54.94%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600,000.00	576,000.00	24,000.00	96.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,800,000.00	1,300,000.00	500,000.00	72.22%
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	3,689,000.00	1,695,200.00	1,993,800.00	45.95%
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,970,000.00	0.00	5,970,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,987,100.00	22,764,934.00	70,222,166.00	24.48%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00%
<b>07.2.01.</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>2,929,341.00</b>	<b>16,070,659.00</b>	<b>15.42%</b>
<b>07.2.01.02.</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>2,929,341.00</b>	<b>16,070,659.00</b>	<b>15.42%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,000,000.00	1,016,041.00	1,983,959.00	33.87%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5,000,000.00	1,461,000.00	3,539,000.00	29.22%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120,000.00	74,300.00	45,700.00	61.92%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130,000.00	128,000.00	2,000.00	98.46%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250,000.00	250,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.03.03.0052.	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,451,446,870.00</b>	<b>2,195,757,178.00</b>	<b>2,255,689,692.00</b>	<b>49.33%</b>

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 menjelaskan bahwa 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 49,33%. Sedangkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 74,32% dari target kinerja sebesar 51,04%.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.2 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Triwulan II Tahun 2023**

Kode	Sasaran	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah						
					5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100					
					K	RP	K	RP	K	RP Renja	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP	K	RP		
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		4A		23,811,443,000	3,323,002,609		4,867,016,288		3,895,909,860		827,516,763		2,048,552,820																
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKIP	NILAI	80.05	291,050,000	80.61	24,682,308	79.00	58,210,000	79.00	39,327,464	73.15	1,565,642	73.15	5,701,105															
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	291,050,000	100	24,682,308	100	58,210,000	100	39,327,464	100	1,565,642	100	5,701,105															
1.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	291,050,000	2	24,682,308	2	58,210,000	2	39,327,464	2	1,565,642	2	5,701,105															
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persentase	90	21,448,546,000	0	2,668,766,933	85	4,166,306,288	85	3,192,369,664	100	760,822,724	100	1,843,508,737															
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu	1	15,199,100,000	1	2,668,766,933	1	3,039,820,888	1	2,225,796,609	1	664,266,869	1	1,510,699,242															
1.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	15,199,100,000	19	2,668,766,933	19	3,039,820,888	20	2,225,796,609	20	664,266,869	20	1,510,699,242															
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persentase	95	32,400,000	0	0	95	16,200,000	95	24,730,000	95	979,140	95	2,447,850															
1.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	54	32,400,000	0	0	27	16,200,000	31	24,730,000	0	979,140	29	2,447,850															
1.06.01.2.05.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	Persentase	27	210,000,000	0	0	11	30,000,000	11	34,018,380	0	0	10	0															
1.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	210,000,000	0	0	2	30,000,000	2	34,018,380	0	0	2	0															
1.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	75	2,261,046,000	75	411,285,838	75	685,085,400	75	371,124,140	75	30,606,900	75	121,671,572															
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	240,000,000	8	193,091,831	1	255,500,000	1	78,000,000	1	15,187,500	1	43,794,000															
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	108,000,000	1	37,072,500	1	25,000,000	1	6,000,000	1	0	1	0															
1.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	58,800,000	1	9,580,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	1,875,000	1	4,260,000															
1.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	164,832,000	3	16,442,000	3	32,966,400	3	23,175,000	3	3,119,400	3	13,291,700															
1.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	60,000,000	1	10,050,000	1	12,000,000	1	12,000,000	0	0	1	6,000,000															
1.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	80,354,000	1	34,246,000	1	40,354,000	1	2,000,000	0	0	1	1,985,000															
1.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	1,429,060,000	60	110,803,507	28	307,285,000	28	237,949,140	12	10,425,000	20	52,340,872															
1.06.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	24	120,000,000	0	0	6	30,000,000	6	11,670,000	0	0	0	0															

1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase	70	2,200,000,000	80	414,186,000	50	75,000,000	80	211,000,535	80	3,569,500	80	8,923,750						80	8,923,750	100	4.23	160	423,109,750	229	19.23	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	875,000,000	1	414,186,000	1	75,000,000	1	44,000,000	0	3,569,500	0	8,923,750						0	8,923,750	0	20.28	1	423,109,750	100	48.36	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	45	675,000,000	0	0	10	175,000,000	3	40,000,000	0	0	0	0						0	-	0	-	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	450,000,000	1	0	10	150,000,000	15	117,000,535	0	0	0	0						0	-	0	-	1	0	3	0.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	20	200,000,000	1	0	5	50,000,000	10	10,000,000	0	0	0	0						0	-	0	-	1	0	5	0.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	80	1,195,000,000	80	216,008,814	80	240,000,000	80	228,000,000	80	55,726,248	80	121,964,008	80	121,964,008	100	53.49	160	337,972,822	200	28.28	160	337,972,822	200	28.28	Dinas Sosial		
1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	34,000,000	1	21,621,130	1	8,000,000	1	26,500,000	1	5,057,600	1	13,644,000						1	13,644,000	100	51.49	2	35,265,130	200	103.72	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	6,000,000	1	0	1	1,000,000	1	500,000	1	32,000	1	71,000						1	71,000	100	14.20	2	71,000	200	1.18	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,155,000,000	12	194,387,684	12	231,000,000	12	201,000,000	3	50,636,648	6	108,249,008						6	108,249,008	50	53.86	18	302,636,692	150	26.20	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	75	351,000,000	75	34,668,131	70	80,200,000	75	97,700,000	75	5,674,067	75	77,802,315	75	77,802,315	100	79.63	150	112,470,446	200	32.04	150	112,470,446	200	32.04	Dinas Sosial		
1.06.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Yendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	2	121,000,000	2	22,768,131	2	24,200,000	2	40,700,000	2	5,274,067	2	23,518,515						2	23,518,515	100	57.79	4	46,286,646	200	38.25	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.06.	Pemeliharaan Perabitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	24,000,000	3	5,950,000	5	6,000,000	4	7,000,000	3	400,000	3	4,800,000						3	4,800,000	75	68.57	6	10,750,000	20	44.79	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	206,000,000	3	5,950,000	5	50,000,000	4	50,000,000	3	0	3	49,483,800						3	49,483,800	75	98.97	6	55,433,800	20	26.91	Dinas Sosial	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persentase	50	1,856,847,000	40	90,159,671	50	350,000,000	50	135,591,000	50	2,259,852	50	60,874,692	50	60,874,692	100	44.90	90	151,034,363	180	8.13	90	151,034,363	180	8.13	Dinas Sosial		
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKS yang dikembangkan	PKSK	6	1,856,847,000	5	90,159,671	5	350,000,000	5	135,591,000	6	2,259,852	6	60,874,692						6	60,874,692	120	44.90	11	151,034,363	183	8.13	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan	Orang	50	550,000,000	30	87,940,671	40	150,000,000	0	0	0	0	0	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	30	87,940,671	60	15.99	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	1,056,847,000	0	16	150,000,000	16	98,435,000	0	2,259,852	17	59,239,192							17	59,239,192	106.3	60.18	17	59,239,192	34	5.61	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	250,000,000	0	2,219,000	1	50,000,000	1	37,156,000	0	0	0	1,635,500						0	1,635,500	0	4.40	0	3,854,500	0	1.54	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase	25.55556	(1,400,000,000)	81	(1,573,906,800)	17.1634	87,500,000	6.686275	171,001,391	4.1634	(1,784,750)	81	(33,910,250)	1211.43695	(19.83)	162	-1,607,817,050	634	114.84	Dinas Sosial								
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24.976608	(12,500,000)	1	-207,093,000	16.8414173	87,500,000	5.28482972	46,500,268	2.8228734	-1,784,750	0	(4,461,875)	0	(9.60)	1	-211,554,875	4	1,692.44	Dinas Sosial								
1.06.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	24.97661	(237,500,000)	1	-331,348,800	16.5194358	77,500,000	3.88338493	44,000,321	1.4843481	-2,855,600	0	(7,139,000)	0	(16.22)	1	-338,487,800	5	142.52	Dinas Sosial								
1.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23.818713	(462,500,000)	1	-455,604,600	16.1974544	67,500,000	2.48194014	41,500,375	0.1448228	-3,926,450	0	(9,816,125)	0	(23.65)	1	-465,420,725	5	100.63	Dinas Sosial								
1.06.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	23.239766	(687,500,000)	1	-579,860,400	15.875473	57,500,000	1.08049536	39,000,428	-1.194702	-4,997,300	0	(12,493,250)	0	(32.03)	1	-592,353,650	6	86.16	Dinas Sosial								
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	22.66682	2,715,000,000	81	6,097,306,200	15.55349	355,000,000	-0.320949	674,057,831	-2.53423	153,184,014	81	288,854,010	29237.62998	42.85	162	6,386,160,210	715	235.23	Dinas Sosial								



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2023 secara keseluruhan relatif baik. Berdasarkan evaluasi renja Dinas Sosial Triwulan II tahun anggaran 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Terdapat satu Program dengan dua Indikator Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator (1) Nilai Laporan LKjIP dengan target 79% telah teralisasi 73.15% dengan capaian 92,59%, dan (2) Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP dengan target 85% teralisasi 100% dengan capaian 117,65%. Sehingga Program tersebut telah terealisasi dengan rata-rata capaian sebesar 105,12%. Dari beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan di Sekretariat, hanya kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang belum terlaksana dikarenakan kegiatan tersebut ditargetkan terlaksana pada triwulan III.

### **2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Terdapat tiga Program dan tiga Indikator Program, yaitu (1) Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator program Persentase Pemberdayaan Sosial dengan target 50% teralisasi 50% dengan capaian 100%, (2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS dengan target 60,09% telah teralisasi 89,57% dengan capaian 149,06%, (3) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan target 100% teralisasi 100% dengan capaian 100%. Sehingga dari ketiga Program tersebut telah teralisasi dengan rata-rata capaian sebesar 116,35%. Dari beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ada satu Sub Kegiatan yang belum teralisasi yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

### 3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Terdapat dua Program dengan dua indikator Program yaitu (1) Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator Persentase Rehabilitasi Sosial dengan target 100% telah teralisasi 100% dengan capaian 100%, (2) Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya dengan target 100% telah teralisasi 100% dengan capaian 100%.

Secara umum realisasi Kinerja Program pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna triwulan II tahun anggaran 2023 sangat memuaskan, rata-rata capaian program kinerja pada triwulan II diperoleh 106,94%. Sedangkan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 49,33%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Capaian Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,04	74,32	146%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa Indikator Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah teralisasi 74,32% dengan capaian 146% dan telah melebihi target.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
  - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional
  - Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
  - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
  - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
  - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
  - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
  - Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.

- Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan sosial
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Natuna tahun 2023, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
- b. Mengarah pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2023 tertuang dalam Lampiran I (Tabel Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024).

#### **3.2 Cascading dan Crosscutting**

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting). Cascading Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran II (Cascading Dinas Sosial Tahun 2023), sedangkan Crosscutting Dinas Sosial Tahun 2023 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertikal (secara hirarki struktural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Lampiran III (Crosscutting Kinerja Program pada Dinas Sosial Tahun 2023).

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2023 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2023.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2023 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 14 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP., M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NAMA PD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5,847,629,300	5,439,953,125		
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								5,847,629,300	5,439,953,125		
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	79.00 NILAI			58,210,000	36,041,831		
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	58,210,000	36,041,831		
1.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	58,210,000	36,041,831		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Tahunan SKPD							2 Laporan	58,210,000	36,041,831		
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			4,383,451,400	4,145,831,552		
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,039,820,000	3,032,639,875		
1.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3,039,820,000	3,032,639,875		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN							19 Orang/bulan	3,039,820,000	3,032,639,875		
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase aparatur yang bersertifikasi	11,00 %	30,000,000	25,100,000		
1.06.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30,000,000	25,100,000		
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							2 Orang	30,000,000	25,100,000		
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	95,00 %	16,200,000	24,144,840		
1.06.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	16,200,000	24,144,840		
	Belanja Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							29 Paket	16,200,000	24,144,840		
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,00 %	477,231,400	410,784,640		
1.06.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48,000,000	83,660,500		
	Belanja Alat Tulis Kantor, alat dan bahan kebersihan							1 Paket	48,000,000	83,660,500		
1.06.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	0		
	Belanja Peralatan Rumah Tangga (Piring, Gelas, Sendok, Tisu, Gayung, Keset Kaki dan Lainnya)							1 Paket	25,000,000	0		
1.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,000,000	12,000,000		
	Belanja Bahan-Bahan (Gula, Beras, Kopi, Teh dan							1 Paket	12,000,000	12,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lainnya)											
1.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32,966,400	28,175,000		
	Belanja Spanduk, Belanja Penggandaan dan Belanja Cetak							3 Paket	32,966,400	28,175,000		
1.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000		
	Belanja Surat Kabar/Majalah							1 Dokumen	12,000,000	12,000,000		
1.06.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	2,000,000		
	Penyediaan Obat dan lainnya							1 Paket	10,000,000	2,000,000		
1.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	307,265,000	267,949,140		
	Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Makan Minum Rapat Rutin							28 Laporan	307,265,000	267,949,140		
1.06.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	30,000,000	5,000,000		
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							6 Dokumen	30,000,000	5,000,000		
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55,00 %	450,000,000	279,065,285		
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	75,000,000	46,064,750		
	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua							3 Unit	75,000,000	46,064,750		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	150,000,000	36,000,000		
	Belanja Modal Lemari Kayu 2 Pintu							4 Unit	20,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet							3 Unit	20,000,000	15,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja							10 Unit	30,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu							4 Unit	20,000,000	20,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Kayu 4 Pintu							5 Unit	35,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja							6 Unit	24,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring							1 Unit	1,000,000	0		
	BOP							1 Unit	0	1,000,000		
1.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	175,000,000	187,000,535		
	Belanja Modal Pengadaan Mouse Bluetooth							5 Unit	2,500,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Alat Penghancur Kertas							1 Unit	8,000,000	4,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan CCTV							1 Unit	0	15,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kalkulator							5 Unit	2,500,000	2,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan Keyboard Komputer PC							1 Unit	600,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC							4 Unit	51,000,000	70,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kulkas							0 Unit	10,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Laptop							2 Unit	0	32,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Scan Dokumen							1 Unit	21,000,000	7,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Modal Pengadaan Parabola/Reciver							0 Unit	4,400,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Printer							2 Unit	22,000,000	10,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan TV LED							1 Unit	14,000,000	15,000,535		
	Belanja Modal Pengadaan UPS							5 Unit	14,000,000	0		
	BOP							1 Unit	0	1,000,000		
	Penyedia Peralatan Zoom							1 Unit	25,000,000	30,000,000		
1.06.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50,000,000	10,000,000	
	Belanja Pengadaan Umbul-umbul							1 Paket	50,000,000	10,000,000		
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	66,00 %	241,000,000	263,682,360	
1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,000,000	31,245,600	
	Belanja Materai								1 Laporan	8,000,000	31,245,600	
1.06.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000	500,000	
	Belanja Pembayaran Air								1 Laporan	1,000,000	0	
	Belanja Pembayaran Air								1 Laporan	1,000,000	500,000	
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	231,000,000	231,936,760	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji PTT)								12 Laporan	231,000,000	231,936,760	
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	129,200,000	110,414,552	

NAMA PD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	23,200,000	51,414,552		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan dan Pembayaran Pajak/Perizinan							2 Unit	23,200,000	51,414,552		
1.06.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,000,000	9,000,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							5 Unit	6,000,000	9,000,000		
1.06.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1 Unit	50,000,000	0		
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50,000,000	50,000,000		
	Pemeliharaan Tempat dan Halaman Kantor (Rehab WC, Ruangan dan lainnya)							5 Unit	50,000,000	50,000,000		
<b>1.06.02.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>50,00 %</b>			<b>230,000,000</b>	<b>100,076,500</b>		
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah PSKS yang dikembangkan	6 PSKS	230,000,000	100,076,500		
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50,000,000	0		
	Pembinaan dan Sosialisasi untuk							40 Orang	50,000,000	0		

NAMA PD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	meningkatkan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat											
1.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	80,000,000	98,435,000		
	Pembinaan dan Pelaksanaan Sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)							17 Orang	80,000,000	98,435,000		
1.06.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	50,000,000	0		
	Pembinaan dan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)							0 Lembaga	50,000,000	0		
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	50,000,000	1,641,500		
	Pelaksanaan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							1 Sertifikat	50,000,000	1,641,500		
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA	100,00 %			395,000,000	550,263,191		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					TERLANTAR DAN GEPENG DILUAR PANTI SOSIAL							
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00 %	395,000,000	550,263,191		
1.06.04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	0		
	Penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti							10 Orang	50,000,000	0		
1.06.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30,000,000	0		
	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti							10 Orang	30,000,000	0		
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50,000,000	230,800,931		
	Pemberian Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,							30 Orang	50,000,000	230,800,931		

NAMA PD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti											
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	0		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti							0 Orang	50,000,000	0		
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	80,000,000	0		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							0 Orang	80,000,000	0		
1.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	85,000,000	60,712,360		
	Belanja Transportasi/Pemulangan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti							2 Orang	85,000,000	60,712,360		
1.06.04.2.01.12.	Pemberian Layanan Rujukan						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan	5 Orang	50,000,000	258,749,900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)							5 Orang	50,000,000	258,749,900		
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	100,00 %			125,967,900	0		
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi	100,00 %	125,967,900	0		
1.06.04.2.02.01.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50,000,000	0		
	Pemberian Pelayanan Data dan Pengaduan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							20 Orang	50,000,000	0		
1.06.04.2.02.08.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75,967,900	0		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota							0 Orang	75,967,900	0		
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PPKS	60,09 %			275,000,000	326,533,777		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	64,93 %	275,000,000	326,533,777		
1.06.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31479 Orang	90,000,000	0		
	Musdes, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)							31479 Orang	90,000,000	0		
1.06.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2675 Keluarga	50,000,000	0		
	Bantuan Sosial Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota							2675 Keluarga	50,000,000	0		
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2675 Keluarga	85,000,000	277,533,777		
	Monitoring dan EValuasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							2675 Keluarga	85,000,000	277,533,777		
1.06.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	49,000,000		
	Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP)							50 Orang	50,000,000	49,000,000		
1.06.06.	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						<b>PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI</b>	<b>100,00 %</b>	<b>300,000,000</b>	<b>262,206,274</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					KEBUTUHAN DASARNYA							
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100,00 %	200,000,000	97,601,064		
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50,000,000	97,601,064		
	Pemberian Permakanan 3x1 Hari bagi Korban Bencana Alam dan Sosial							10 Orang	50,000,000	97,601,064		
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50,000,000	0		
	Pemberian Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Korban Bencana Alam dan Sosial							10 Orang	50,000,000	0		
1.06.06.2.01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50,000,000	0		
	Pemberian Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Korban Bencana							10 Orang	50,000,000	0		
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50,000,000	0		
	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial							10 Orang	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	bagi Korban Bencana											
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Kampung Siaga Bencana	1 Desa	100,000,000	164,605,210		
1.06.06.2.02.01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	50,000,000	0		
	Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							1 Kampung	50,000,000	0		
1.06.06.2.02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	50,000,000	164,605,210		
	Pelaksanaan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kewenangan Kabupaten/Kota							17 Orang	50,000,000	164,605,210		
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DIKELOLA	100,00 %			80,000,000	19,000,000		
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100,00 %	80,000,000	19,000,000		
1.06.07.2.01.01.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40,000,000	0		
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam							1 Dokumen	40,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	40,000,000	19,000,000		
	Pemeliharaan Makam pada Makam Pahlawan Kabupaten/Kota							11 Makam	40,000,000	19,000,000		
<b>JUMLAH</b>									<b>5,847,629,300</b>	<b>5,439,953,125</b>		

Ranai, 14 Agustus 2023

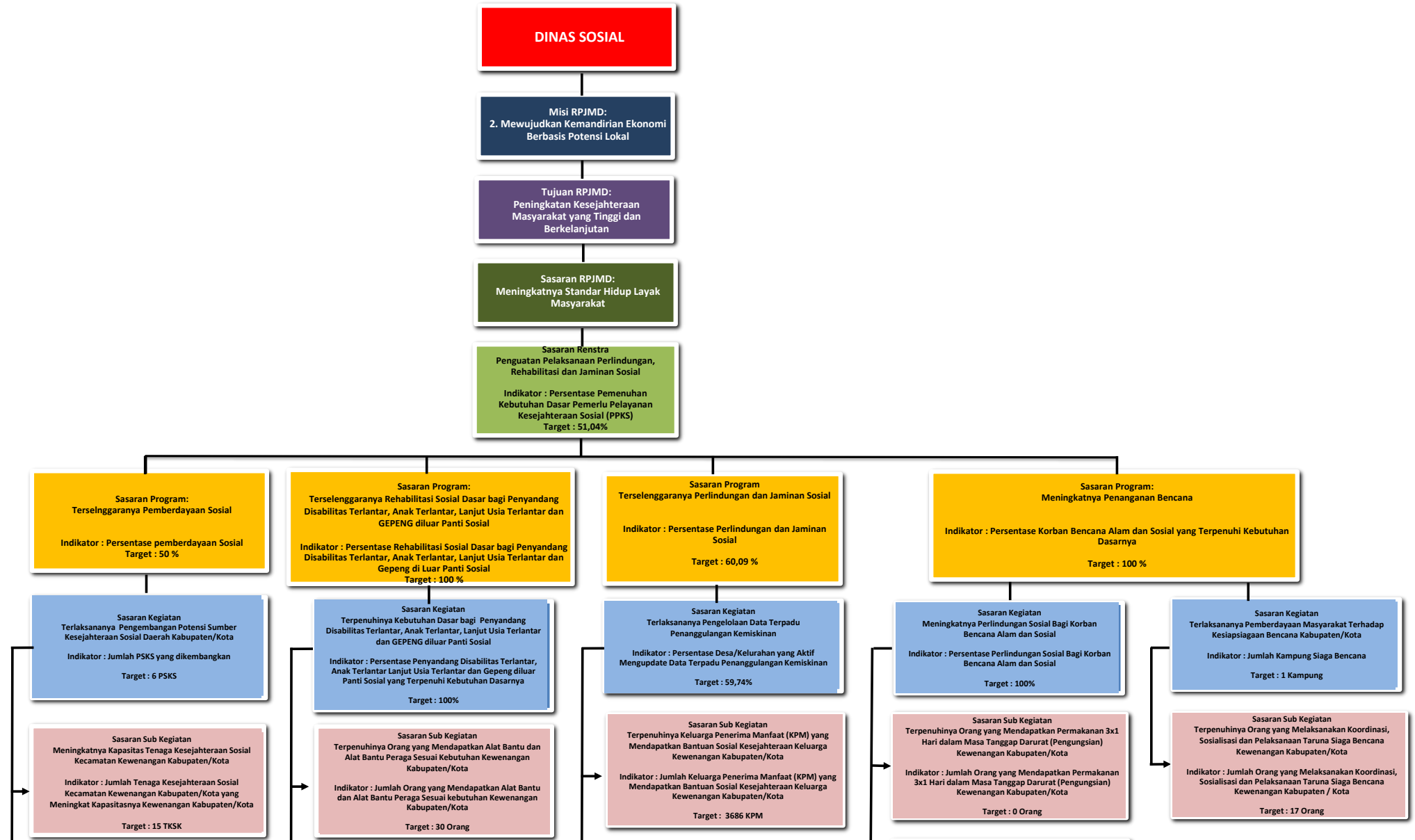
Kepala Dinas Sosial



**PURYANTI, SP. M.A.P.**

**NIP. 19750706 200003 2 008**

# CASCADING DINAS SOSIAL





# CROSSCUTTING PROGRAM DAN KEGIATAN ANTAR BIDANG

